



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*  
*SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Diplomasi Amerika Serikat Terhadap Meksiko dalam**  
**Menangani Isu Imigrasi di Perbatasan**  
**Era Presiden Trump**

Skripsi

Oleh  
Felicia Audry Kusnadi  
2015330128

Bandung  
2019



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*  
*SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Diplomasi Amerika Serikat Terhadap Meksiko dalam**  
**Menangani Isu Imigrasi di Perbatasan**  
**Era Presiden Trump**

Skripsi

Oleh  
Felicia Audry Kusnadi  
2015330128

Pembimbing  
Sukawarsini Djelantik, Dra., M.I.S., Ph.D.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

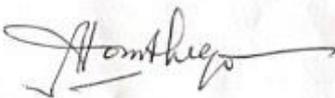


**Tanda Pengesahan Skripsi**

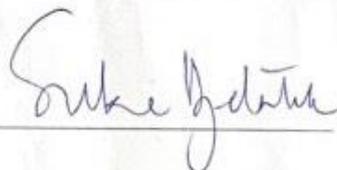
Nama : Felicia Audry Kusnadi  
Nomor Pokok : 2015330128  
Judul : Diplomasi Amerika Serikat terhadap Meksiko dalam Menangani Isu Imigrasi di Perbatasan Era Presiden Trump

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 20 Desember 2019  
Dan dinyatakan **LULUS**

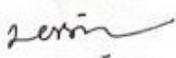
**Tim Penguji**  
Ketua sidang merangkap anggota  
Dr. Atom Ginting Munthe

:   
\_\_\_\_\_

**Sekretaris**  
Sukawarsini Djelantik, Ph.D

:   
\_\_\_\_\_

**Anggota**  
Jessica Martha M.I.Pol

:   
\_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Felicia Audry Kusnadi  
NPM : 2015330128  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Diplomasi Amerika Serikat terhadap Meksiko  
dalam Menangani Isu Imigrasi di Perbatasan  
Era Presiden Trump

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini. Saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Desember 2019



Felicia Audry Kusnadi

## ABSTRAK

Nama : Felicia Audry Kusnadi  
NPM : 2015330128  
Judul : Diplomasi Amerika Serikat terhadap Meksiko dalam Menangani Isu Imigrasi di Perbatasan Era Presiden Trump

---

Pada tahun 2017 lebih dari 44,5 juta imigran tinggal di AS merupakan rekor tertinggi sejak pencatatan sensus yang dimulai pada tahun 2000. Kelompok imigran terbanyak berasal dari Meksiko karena kondisi geografis kedua negara yang berdekatan dan latar belakang ekonomi karena pekerjaan sulit dicari di Meksiko sedangkan perusahaan Amerika membutuhkan buruh dengan upah minim. Namun, datangnya imigran dari Meksiko ini membawa permasalahan bagi penduduk AS, sehingga pemerintah AS melakukan beberapa tindakan diplomasi untuk menyelesaikan masalah imigrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti diplomasi AS terhadap Meksiko mengenai isu imigrasi di perbatasan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data yang dikumpulkan berbentuk artikel, jurnal, berita, buku, internet, dan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Kerjasama Amerika Serikat-Meksiko yang utama adalah masalah perbatasan. Tiap-tiap presiden yang memerintah Amerika Serikat memiliki kebijakan yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan imigrasi ilegal dan perbatasan. (2) Banyaknya imigran ilegal Meksiko yang masuk ke Amerika Serikat menjadi perhatian yang serius pada pemerintahan Presiden Trump. Presiden Trump ingin membangun tembok di perbatasan, menerapkan *zero tolerance*, dan mengancam akan memberlakukan tarif masuk kepada Meksiko jika imigran ilegal tetap masuk ke wilayah AS, (3) Diplomasi bilateral Amerika dan Meksiko terkait isu imigrasi dilakukan dengan melaksanakan beberapa program, pemberian visa, melakukan operasi anti-penyelundupan bersama, memperluas protokol perlindungan migran, dan berkomitmen untuk mengatasi akar penyebab migrasi melalui investasi pembangunan di negara-negara Segitiga Utara Amerika Tengah.

**Kata Kunci:** Diplomasi, Amerika Serikat, Meksiko, Isu Imigrasi, Perbatasan

## **ABSTRACT**

Nama : Felicia Audry Kusnadi  
NPM : 2015330128  
Judul : *Diplomacy of the United States towards Mexico in Dealing with the Issue of Immigration at the Border in Trump Era*

---

*In 2017 more than 44.5 million immigrants living in the US were the highest records since the census recording began in 2000. Most immigrant groups came from Mexico due to the geographical conditions of the two neighboring countries and economic background because jobs were hard to find in Mexico while companies in America needs workers with low wages. However, the arrival of immigrants from Mexico brought problems for the US citizens, However, the arrival of immigrants from Mexico brought problems for the US population, so the US government took several diplomatic actions to solve the immigration problem. The purpose of this study is to examine US and Mexico diplomacy on the issue of immigration at the border. The author uses qualitative research methods with data sources collected in the form of articles, journals, news, books, internet, and others.*

*The results of the research, (1) the main United States-Mexico collaboration was border issues. Each president who governs the United States has a different policy in solving the problem of illegal and border immigration. (2) The large number of Mexican illegal immigrants entering the United States is a serious concern for President Trump's administration. President Trump wants to build a wall on the border, apply zero tolerance, and threaten to impose tariffs on Mexico if illegal immigrants continue to enter US territory, (3) American and Mexican bilateral diplomacy related to immigration issues carried out by implementing several programs, granting visas, conducting joint anti-smuggling operations, expanding migrant protection protocols, and committed to addressing the root causes of migration through development investment in the Central Triangle countries of North America.*

**Keywords:** *Diplomacy, United States, Mexico, Immigration Issues, Borders*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas Rahmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Diplomasi Amerika Serikat terhadap Meksiko dalam Menangani Isu Imigrasi di Perbatasan Era Presiden Trump” dengan baik. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hubungan Internasional di Universitas Katholik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kepada Tuhan YME atas berkat dan penyertaanNya selama skripsi ini ditulis.
2. Kedua orang tua penulis, Ibunda tersayang Mey Lina yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan Ayahanda penulis Aang Kusnadi, terimakasih sudah berjuang selama beberapa tahun kebelakang dan membuat penulis semangat untuk tetap berjuang.
3. Kepada Oma penulis yang senantiasa menjaga penulis sedari kecil hingga duduk dibangku kuliah, yang selalu merawat dan menyayangi penulis.
4. Kepada Koko Andry Kusnadi yang juga member dukungan secara moril dan materil selama penulis kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini serta Cici Anne dan Koko Adam yang mendukung kelancaran perkuliahan penulis

5. Kepada dosen pembimbing penulis Mbak Sukawarsini Djelantik, Dra., M.I.S., Ph.D. yang sudah membimbing penulis sampai skripsi ini dapat selesai, dan terimakasih sudah diajak terlibat dalam Program Citarum Harum dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya selama pengerjaan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu/Mbak/Mas dosen Fakultas FISIP UNPAR yang telah membagikan pengetahuannya selama masa perkuliahan.
7. Seluruh teman-teman yang telah mengisi hari-hari penulis selama dunia perkuliahan dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Bandung, Desember 2019

Penulis,



Felicia Audry Kusnadi

## DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR SINGKATAN .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	11
1.2.1 Pembatasan Waktu.....	13
1.2.2 Perumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
1.4 Kajian Literatur .....	15
1.5 Kerangka Pemikiran .....	19
1.6 Metode Penelitian.....	23
1.7 Sistematika Penulisan .....	24
BAB II HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DAN MEKSIKO .....	25
TERKAIT ISU IMIGRASI.....	25
2.1 Latar Belakang Masuknya Imigran dari Meksiko ke AS .....	26
2.2 Kebijakan Imigrasi Pemerintahan Bill Clinton (1993-2001).....	32
2.3 Kebijakan Imigrasi Pada Masa Pemerintahan George W.Bush (2001-2009).....	34
2.4 Kebijakan Imigrasi Pada Masa Pemerintahan Barack Obama (2009-2017).....	42
BAB III DIPLOMASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP MEKSIKO	
DALAM MENGATASI ISU IMIGRASI DI PERBATASAN .....	53
ERA PEMERINTAHAN TRUMP .....	53
3.1 Kerjasama/Program AS dan Meksiko Terkait Isu Imigrasi.....	56

3.2	Kebijakan Visa .....	58
3.3	Membangun Tembok Perbatasan Pada Masa Pemerintahan Trump .....	63
BAB IV KESIMPULAN.....		88
DAFTAR PUSTAKA .....		92

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Presiden Roosevelt menyambut Alberto J. Pani di konferensi perdagangan antara kedua negara, Mei 1933 ..... 27
Gambar 2.2	Pekerja kebun dari Mexico ke California tahun 1942..... 28
Gambar 2.3	Pekerja Meksiko menunggu kepastian hukum sebagai pekerja legal di AS ..... 29
Gambar 2.4	Imigran Ilegal yang dikembalikan ke Perbatasan ..... 31
Gambar 2.5	Presiden Bush dan Presiden Fox pada Konferensi Press di Monterrey Meksiko untuk membahas <i>Smart Border</i> ..... 36
Gambar 2.6	Presiden Bush bertemu Presiden Fox di Cancun ..... 41
Gambar 2.7	Presiden AS Barack Obama dan Presiden Enrique Pena Nieto..... 45
Gambar 3.1	Jumlah Imigran gelap yang masuk ke AS 1990-2017 ..... 55
Gambar 3.2	Imigran yang memakai Karavan di Meksiko City 2018 ..... 57
Gambar 3.3	Jumlah Imigran yang masuk ke AS berbanding ..... 61
Gambar 3.4	Veteran militer AS mengawasi langsung tahap awal pembangunan tembok di perbatasan dengan Meksiko yang menggunakan dana dari pendukung Presiden Donald Trump ..... 64
Gambar 3.5	Kondisi Tembok Perbatasan pada Pemerintahan Trump ..... 65
Gambar 3.6	Pembatas yang sudah ada sebelum 2017..... 66
Gambar 3.7	Prototipe Tembok Pembatas Meksiko..... 67
Gambar 3.8	Orang-orang yang ingin masuk ke AS duduk di atas gerbong kereta barang, yang dikenal dengan La Bestia ( <i>The Beast</i> ) di Ixtepec, negara bagian Meksiko, Oaxaca, 18 Juni 2014 ..... 68
Gambar 3.9	Penangkapan di Perbatasan AS-Meksiko ..... 69
Gambar 3.10	Pernyataan Trump mengenai Tembok Perbatasan..... 77
Gambar 3.11	Potongan Tembok Berlin seberat 2,7 ton ..... 79

## DAFTAR SINGKATAN

ACS	: <i>American Community Survey</i>
AS	: Amerika Serikat
CFR	: <i>Council on Foreign Relations</i>
CNN	: Cable News Network
CPB	: <i>Customs and Border Protection</i>
BECC	: <i>Border Environment Cooperation Commision</i>
DACA	: <i>Deferred Action for Childhood Arrival</i>
DHS	: <i>Departement of Homeland Security</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
FAST	: <i>Free and Secure Trade</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
INA	: <i>Immigration Nation Act</i>
INS	: Layanan Imigrasi dan Naturalisasi
LIFA	: <i>Latino and Immigrant Fairness Act</i>
LPR	: <i>Lawful Permanent Resident</i>
MPP	: <i>Migrant Protection Protocol</i>
NAFTA	: <i>North American Free Trade Agreement</i>
NADBank	: Bank Pembangunan Amerika Utara
OAS	: Organisasi American States
OPIC	: <i>Overseas Private Investment Corporation</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SENTRI	: <i>Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection</i>
SPP	: <i>Security and Prosperity Partnership</i>

USGS : *United States Geological Survey*  
WTC : *World Trade Center*  
VOA : *Voice of Indonesia*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemampuan negara untuk berdiplomasi merupakan elemen yang sangat penting agar dapat menjalin hubungan baik dengan negara lain. Diplomasi sebagai pelaksanaan kebijakan luar negeri, selain juga merupakan cara untuk menjalin kerjasama dalam hubungan internasional demi mencapai kepentingan bersama, melalui negosiasi dan tawar menawar. Diplomasi dikatakan berhasil apabila konflik dapat diselesaikan tanpa melalui kekerasan, peperangan, atau dengan pengorbanan yang paling sedikit. Untuk meningkatkan citra positif negara, diplomasi dewasa ini telah berkembang, tidak hanya dilakukan oleh aktor-aktor pemerintahan tetapi juga melibatkan lembaga-lembaga maupun individu yang tidak berada di dalam struktur pemerintahan.<sup>1</sup>

Pada tahun 2017, sebuah tantangan baru untuk hubungan antara Meksiko dan Amerika Serikat (AS) telah muncul: diusulkannya dinding perbatasan yang diperluas, negosiasi ulang Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), dan ancaman tarif potensial pada perdagangan Meksiko (diperuntukkan untuk membayar infrastruktur keamanan baru). Sebagai seorang kandidat, Presiden Trump menyatakan, “Kami akan membangun tembok besar yang tidak bisa ditembus untuk membatasi Meksiko dan AS, yang akan dibayar oleh Meksiko. Presiden Meksiko Enrique Peña Nieto membalas bahwa Meksiko

---

<sup>1</sup>Sukawarsini Djelantik. 2016, ”Diplomasi dalam Politik Global, “ Halaman xi

tidak akan pernah membayar untuk tembok itu, sementara mantan Presiden Vicente Fox merespons dengan kata-kata yang lebih keras, yaitu *El muro* dan militerisasi perbatasan, tetapi yang lebih penting, ketentuan oleh Presiden Trump bahwa Meksiko membayar untuk pembangunan tembok itu, sangat menyinggung sebagian besar orang Meksiko, yang melihat permintaan tersebut sebagai pengkhianatan simbolis dari hubungan Meksiko-AS.<sup>2</sup>

Meksiko merupakan sebuah Konstitusi Republik federal di Amerika Utara yang berbagi perbatasan dengan AS sejauh 2.000 mil ditambah dengan 55 pelabuhan.<sup>3</sup> Hal ini membuat Meksiko menjadi salah satu tetangga AS yang letaknya berdekatan satu sama lain dan tentunya memiliki hubungan bilateral yang memiliki dampak langsung pada keseharian dan mata pencaharian jutaan orang AS.

AS dan Meksiko menjalin beberapa hubungan bilateral dalam bidang ekonomi, pendidikan, keamanan, pengendalian narkoba, migrasi dan juga perdagangan.<sup>4</sup> Dalam hal kerjasama bidang ekonomi, salah satunya AS dan Meksiko telah menandatangani beberapa perjanjian bilateral. Seperti perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA) pada tahun 1994. Meksiko juga termasuk kedalam beberapa organisasi negara-negara AS dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satunya Meksiko bergabung dalam *Organisasi*

---

<sup>2</sup> Deeds, Colin dan Scott Whitefor, 2017, "*The Social and Economic Costs of Trump's Wall*. Voices of Mexico 102," diakses pada 29 September 2019 melalui <http://www.revistascisan.unam.mx/Voices/pdfs/10207.pdf>

<sup>3</sup>U.S. Department of State , 2019, "Mexico."diakses pada 27April 2019 melalui <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35749.htm#>.

<sup>4</sup> Valenzuela, Encinas, and Jesus Ernesto, 2016, "Figure 2f From: Irimia R, Gottschling M (2016) Taxonomic Revision of Rochefortia Sw. (Ehretiaceae, Boraginales)," diakses pada 29 September 2019 melalui Biodiversity Data Journal 4: E7720. <https://doi.org/10.3897/BDJ.4.e7720>." 2006. doi:10.3897/bdj.4.e7720.figure2f.

*American States* (OAS) yang merupakan organisasi regional multilateral difokuskan pada hak asasi manusia, pengawasan pemilu, pembangunan sosial dan ekonomi, dan keamanan. Organisasi ini juga diakui oleh banyak ahli kebijakan luar negeri sebagai forum penting untuk diplomasi regional. Sehingga AS pada dasarnya memiliki hubungan yang baik dengan Meksiko.

Selain hubungan kerjasama yang baik, AS dan Meksiko juga memiliki beberapa masalah terkait perbatasan negaranya. Setelah kemerdekaan Meksiko pada tahun 1810, Meksiko dan AS memiliki banyak perselisihan terkait wilayah. Pergolakan politik setelah Revolusi Meksiko dan peluang perbaikan ekonomi mendorong warga negara Meksiko melintasi perbatasan ke AS. Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) membuka jalan bagi hubungan AS-Meksiko yang lebih dekat dalam keamanan, perdagangan, dan kebijakan anti-narkotika.<sup>5</sup>

Dikarenakan kondisi geografis AS dan Meksiko yang berdampingan dan sangat panjang membuat perbatasannya menjadi tidak jelas sehingga membuat AS merasa *insecure*. Amerika merasa bahwa dengan perbatasan yang panjang tersebut maka para imigran yang tidak memiliki dokumen akan dengan bebas masuk ke wilayah AS. Dengan masuknya imigran tanpa dokumen ini, pemerintah AS khawatir bahwa para imigran gelap ini akan merebut kesempatan kerja bagi warga AS, menjadi pengedar narkotika dan menjadi aktor dalam perdagangan manusia. Menurut Kedutaan Besar AS di Meksiko, terdapat lebih dari satu juta warga AS yang tinggal di Meksiko dan begitu pula sebaliknya Meksiko

---

<sup>5</sup>CFR (Council on Foreign Relations), 2019, "U.S –Mexico Relations," diakses pada 29 September 2019 melalui <https://www.cfr.org/timeline/us-mexico-relations>

merupakan sumber imigran terbesar di AS. Namun yang dikhawatirkan AS adalah imigran ilegal dan perdagangan narkoba yang menjadi penyebab masalah di perbatasan AS-Meksiko. Tetapi, masalah tersebut tidak menjadi penghalang AS dan Meksiko agar tetap melakukan berbagai kerjasama.<sup>6</sup> Pada penelitian ini, fokus penelitian adalah isu imigrasi pada masa Presiden Trump. Karena Presiden Trump menginginkan kebijakan imigrasi yang dinilai diskriminatif dan ingin membangun tembok di sepanjang perbatasan AS dan Meksiko untuk membendung imigran ilegal masuk ke wilayah AS dari Meksiko.

Departemen Keamanan Dalam Negeri atau *Department of Homeland Security* (DHS) mendefinisikan imigran ilegal sebagai penduduk yang tidak sah yang bukan penduduk resmi suatu Negara serta tidak memiliki beberapa syarat dokumen tertentu dalam memasuki suatu wilayah. Sebagian besar penduduk yang tidak sah tersebut masuk ke AS tanpa adanya pemeriksaan dan tetap tinggal diluar tanggal yang telah ditentukan oleh bagian imigrasi negara.<sup>7</sup> Hampir setengah dari 12 juta lebih imigran ilegal di AS tiba secara legal menggunakan visa sementara non-imigran. Pada tahun 2010 Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) memperkirakan bahwa persentase substansial dari populasi imigran ilegal di AS berasal dari imigran dengan visa yang kadaluarsa. Jumlah imigran dengan visa yang kadaluarsa ini diperkirakan berkisar antara 27 hingga 57 persen.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>U.S. Embassy & Consulates in Mexico, 2019, "U.S.- Mexico Relations - Policy & History.". diakses online pada 27 April 2019. Melalui <https://mx.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/>.

<sup>7</sup>. Michael Roffer dkk. 2011, "Estimates of the Unauthorized Immigrant Population Residing in the United States: January 2010, " diakses pada tanggal 27 April 2019 melalui <https://cis.org/Immigration-Topic/IllegalImmigration>

<sup>8</sup>CIS.org, 2019, "Topic Page: Illegal Immigration.".diakses pada tanggal 6 Mei 2019 melalui. <https://cis.org/Immigration-Topic/Illegal-Immigration>.

Isu tentang imigrasi selalu hadir dalam debat politik dan publik di AS, selain pembahasan tentang kebijakan imigrasi yang sedang berlangsung terdapat isu tentang pembangunan dinding perbatasan, pembatasan pemukiman bagi pengungsi, pemisahan keluarga, dan banyak lagi. Namun, ketika pandangan politik dan individu tentang isu imigrasi ini bermasalah, maka arus imigrasi dan susunan populasi imigran AS akan berubah secara signifikan, meskipun tidak selalu sepenuhnya berubah.<sup>9</sup>

Lebih dari 44,5 juta imigran tinggal di AS pada tahun 2017, yang merupakan rekor tertinggi sejak pencatatan sensus yang dimulai pada tahun 2000. Menurut data Komunitas Survey AS atau *American Community Survey* (ACS) 2017, satu dari tujuh penduduk AS adalah warga negara asing. Sementara pangsa imigran saat ini 13,7 persen dari keseluruhan populasi A.S. (325,7 juta orang) telah meningkat sejak rekor terendah pada tahun 1970, tetapi rekor ini masih ada di bawah rekor historis sebesar 14,8 persen yang dicapai pada tahun 1890. Antara 2016 dan 2017, populasi kelahiran imigran asing meningkat sekitar 787.000, atau hampir 2 persen lebih tinggi dari pertumbuhan 1 persen yang terjadi antara 2015 dan 2016, tetapi lebih rendah dari peningkatan 3 persen antara 2013 dan 2014. Pada 2017, orang Meksiko menyumbang sekitar 25 persen imigran di AS, menjadikan mereka kelompok kelahiran asing terbesar.<sup>10</sup> Banyaknya kelompok imigran dari Meksiko ini dikarenakan latar belakang ekonomi karena perusahaan AS membutuhkan buruh dengan upah minim.

---

<sup>9</sup>Jie Zong, Jeanne Batalova, and Micayla Burrows. 2019, "*Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in the United States*," diakses pada tanggal 29 September 2019 melalui <https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-united-states>

<sup>10</sup>Ibid, Jie Zong, Jeanne Batalova, and Micayla Burrows

Banyaknya imigran ilegal Meksiko yang masuk ke AS ini menjadi perhatian yang serius pada pemerintahan Presiden Trump. Sebagai presiden AS ke 45, Trump menerapkan kebijakan imigrasi yang sangat ketat. Pada pidato kenegaraannya tanggal 19 Juni 2018 menyebutkan, imigrasi adalah satu-satunya permasalahan karena tidak adanya legislasi atau negosiasi yang merupakan kesalahan Partai Demokrat. AS tidak akan menjadi tempat kemping untuk imigran ataupun penyedia fasilitas untuk pengungsi. Presiden Trump mencontohkan kejadian di Eropa dan tidak dapat membiarkan masalah pengungsi dan imigran tersebut terjadi di AS. Presiden menginginkan keamanan untuk AS dengan cara memperketat kebijakan imigrasi yang dinilainya terburuk di dunia. Trump mengatakan bahwa negara tanpa perbatasan tidak layak disebut sebuah negara. Trump menginginkan sebuah sistem imigrasi berdasarkan prestasi atau kemampuan karena imigran yang tidak memiliki kemampuan hanya akan menjadi kriminal.<sup>11</sup> Kebijakan imigrasi Trump ini berlaku untuk semua warga asing yang bisa di deportasi kecuali bagi imigran anak-anak yang datang ke AS karena mendapat program perlindungan DACA, perlindungan pencegahan bagi anak-anak yang dibuat Presiden Obama.<sup>12</sup>

Masalah imigrasi di perbatasan adalah salah satu isu yang selalu menjadi masalah bagi pemerintah AS dan Meksiko. Sebagai negara adidaya, AS merasa imigran gelap adalah suber masalah. Hanya berselang sebulan sejak menjabat, Presiden Donald J. Trump merealisasikan janji kampanyenya pada masyarakat AS

---

<sup>11</sup> CBC News, 2018, "Republicans on defensive, but Trump digs in separating parents and children at border," diakses pada 16 November 2019 melalui

<https://www.cbc.ca/news/world/trump-border-entry-separation-1.4710448>

<sup>12</sup>R24,2017, "Trump segera deportasi imigran ilegal," diakses pada 16 November 2019 melalui

<https://www.pinterpolitik.com/trump-segera-deportasi-imigran-ilegal/>

dan menerapkan kebijakan negara kepada imigran. Menurut Trump, kebijakan imigrasi AS ini diperukan untuk dapat melindungi kebebasan warga negara AS, dan menghindari geng dan kartel yang mengincar keamanan warga negara AS.<sup>13</sup> Keinginan Donald Trump untuk membangun tembok perbatasan antara AS dan Meksiko bukanlah ide baru. Perbatasan AS-Meksiko sudah diajari dengan penghalang yang berukuran beberapa mil. Di beberapa tempat, pagar tinggi terbentang di bukit-bukit dan gurun yang merupakan daerah perbatasan AS-Meksiko. Di tempat lain, terdapat kawat yang kokoh atau pilar logam.<sup>14</sup>

Menurut *U.S. Geological Survey* (USGS) panjang real perbatasan AS-Meksiko adalah 1,933.4 mil.<sup>15</sup> Presiden AS, Donald Trump, memerintahkan pembangunan pagar dinding di sepanjang perbatasan AS-Meksiko. Trump berharap dinding akan melindungi perbatasan sepanjang 2.000 mil (sekitar 3.218 km). Area yang meliputi beragam geologi, termasuk medan yang tak selalu ramah atau kondusif untuk konstruksi skala besar. Pagar *Smuggler Gulch* dirancang sebagai bagian dari proyek pembangunan bernilai 60 juta dolar AS untuk membentengi perbatasan sepanjang 5,6 km antara San Diego dan Tijuana. Lebih jauh kearah Timur, di Jacumba, California, dinding perbatasan dibangun pada medio 1990-an untuk menghalangi perdagangan manusia dan narkoba.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Whitehouse.gov, 2017, "President Donald J. Trump Taking Action Against Illegal Immigration, diakses online pada 28 Juni 2017 melalui <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumptaking-action-illegal-immigration/>

<sup>14</sup> Assosiated Press, 2016, "Donald Trum isn'the first to call for Mexico wall," diaskes pada tanggal 29 September 2019 melalui <https://www.dailynews.com/2016/07/20/donald-trump-isnt-the-first-to-call-for-mexico-wall/>

<sup>15</sup> Beaver, Janice Cheryl, 2006, "US International Border: Brief Facts," diakses pada tanggal 29 September 2019 melalui <https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21729.pdf>

<sup>16</sup>Julie Erikana, 2017, "*Dinding Perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko Sudah Ada, dan Kami Mengunjunginya,*" diakses pada tanggal 29 September 2019 melalui

Kebijakan imigrasi Presiden Trump menimbulkan reaksi penolakan dari dalam negeri AS. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai bangsa AS yang meyakini negaranya sebagai tanah kebebasan dan harapan. Hal ini juga dianggap sebagai pengingkaran sejarah AS yang dibangun oleh kaum migran dan menempatkan AS sebagai negara yang tidak lagi mendukung demokrasi dan HAM. Pemilihan ketujuh negara tersebut dipertanyakan karena sumber terorisme tidak hanya di tujuh negara tersebut. Dalam berbagai serangan teroris yang terjadi di AS, baik pada 11 September 2001 maupun sesudahnya, tak seorang pun dilakukan oleh imigran atau warga negara AS yang lahir dari keluarga yang berasal dari ketujuh negara tersebut. Muncul kecurigaan bahwa pemilihan tujuh negara itu karena Donald Trump tidak memiliki hubungan bisnis di negara-negara tersebut. Presiden Trump beralih penentuan tujuh negara tersebut merupakan lanjutan dari kebijakan Presiden Obama.<sup>17</sup> Hal ini akan menyebabkan memburuknya hubungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya antara AS dan Meksiko yang telah dibangun sejak awal abad ke-19 terlepas dari perubahan-perubahannya.<sup>18</sup>

Pada tanggal 7 Mei 2018 Pengadilan Negara AS mulai menerapkan kebijakan ‘toleransi nol’ pada imigran ilegal yang menyeberangi perbatasan untuk menekan jumlah pemberian suaka dengan alasan bahwa petugas bea cukai di perbatasan sering korup. Dibawah kebijakan ‘toleransi nol’ pengadilan negara dapat menahan

---

<https://nationalgeographic.grid.id/read/13307316/dinding-perbatasan-amerika-serikat-dan-meksiko-sudah-ada-dan-kami-mengunjunginya?page=all>

<sup>17</sup> Adirini Pujayanti, 2017, “Kebijakan Imigrasi Pemerintahan Presiden Donald Trump. Majalah Info Singkat Hubungan Internasional. Vol. IX, No. 03/I/Puslit/Februari/2017

<sup>18</sup>Shinji Yamasaki. The Changing Frontline of the Mexican-American Border: A New Community “MexAmerica”.*Professor, Faculty of Political Science and Economics, Waseda University.* (online) [https://yab.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/opinion/international\\_160606.html](https://yab.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/opinion/international_160606.html)

semua imigran yang telah dewasa yang melintasi perbatasan dengan ilegal dan menahan semua pengungsi tanpa terkecuali meskipun mereka memiliki anak kecil.<sup>19</sup>

Kebijakan ‘toleransi nol’ Presiden Trump sangat bertolak belakang dengan kebijakan pemerintahan AS sebelumnya. Pada Sabtu, 29/12/2018, AS menjadi tujuan banyak imigran asal negara-negara Amerika Selatan yang datang mencari suaka. Presiden Trump mengatakan bahwa alternatif dari isu imigrasi AS dengan perbatasan di Meksiko ini dapat diselesaikan dengan pembangunan tembok di perbatasan. Dengan adanya tembok di perbatasan maka akan ada pemisahan total dari Meksiko, termasuk membuat perusahaan mobil AS menarik keluar pabrik mereka.<sup>20</sup>

Kebijakan Trump mengenai isu imigrasi dan perbatasan ini menuai banyak kecaman dari berbagai pihak dikarenakan alasan kemanusiaan. Tembok yang direncanakan Trump akan memisahkan AS dan Meksiko sepenuhnya yang mengingatkan dengan Tembok Berlin yang memisahkan Jerman Timur dan Jerman Barat karena perbedaan ideologi. Tembok yang menjadi simbol pemisah warga Jerman Barat dan Jerman Timur dirobohkan oleh massa. Tembok Berlin didirikan pada 1961 ketika perang ideologi berkecamuk di Jerman. Jerman Timur di bawah pengaruh sosialisme Uni Soviet membangun tembok ini karena banyak warganya khususnya yang muda, lari ke Jerman Barat. Saat itu, Jerman Barat

---

<sup>19</sup>Congressional Research Service, 2019, “The Trump Administration’s “Zero Tolerance” Immigration Enforcement Policy,” diakses pada 26 Februari 2019 melalui <https://fas.org/sgp/crs/homesecc/R45266.pdf>

<sup>20</sup> CNN Indonesia, 2018, “Trump Ancam tutup seluruh Perbatasan AS-Meksiko,” diakses pada 16 November 2019 melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181229030538-134-357220/trump-ancam-tutup-seluruh-perbatasan-as-meksiko>

yang mengadopsi demokrasi dan kapitalisme barat. Sebanyak 5.000 orang gagal menembus blokade tembok. Selain itu, sebanyak 191 orang meninggal dunia dalam usaha untuk melintasi tembok pembatas tersebut.<sup>21</sup> Dengan adanya tembok di perbatasan AS-Meksiko pada kondisi perbatasan kedua negara akan berada pada kondisi *alienated*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penerapan kebijakan imigrasi Meksiko dan AS pada masa pemerintahan Trump memerlukan negosiasi dengan cara diplomasi. Karena imigran gelap yang datang memasuki wilayah AS adalah orang-orang yang berusaha kabur dari keadaan yang tidak kondusif di negaranya. Imigran ini menghadapi kemiskinan, bencana alam, gagal panen dan perang yang membuat para imigran tersebut tidak menemui kenyamanan untuk terus tinggal di negaranya masing-masing. Dengan menolak para imigran ini, maka AS akan dianggap sebagai negara yang tidak mengedepankan isu kemanusiaan.

Dengan kenyataan tentang banyaknya imigran yang ingin masuk ke wilayah AS inilah maka kebijakan imigrasi pada masa pemerintahan Presiden Trump penting untuk dianalisa karena melibatkan isu kemanusiaan dan juga keamanan di kedua wilayah negara. Kebijakan Trump yang mempersulit imigran masuk ke wilayah AS akan membuat para keluarga imigran terlantar yang tertahan di perbatasan AS-Meksiko dan tidak memiliki kepastian hukum. Presiden Trump dapat dikatakan anti pada imigran. Dalam pandangan Presiden Trump, isu

---

<sup>21</sup>Nibras Nada Nailufar, 2019, "Sebagai Sindiran, Trump Dikirim Potongan Tembok Berlin Kompas.com, diakses pada 12 November 2019 melalui <https://internasional.kompas.com/read/2017/03/06/22363571/presiden.trump.segera.tandatangani.kebijakan.anti-imigran.baru>

imigrasi dapat berhubungan dengan keamanan negara dan menjadi prioritas bagi Trump untuk dapat membendung arus imigran yang masuk ke wilayah AS. Imigran yang masuk ke wilayah AS dari Meksiko dinilai menimbulkan permasalahan sosial dan menimbulkan konflik karena meningkatkan resiko kejahatan.

Meskipun disadari pentingnya diplomasi publik dalam menyelesaikan isu imigrasi yang diterapkan pada masa Pemerintahan Trump, akan tetapi peran pemerintah tetap yang paling menentukan. Maka aktivitas diplomasi bilateral dan multilateral, baik dalam konferensi maupun pertemuan multi aktor, akan tetap menempati posisi yang strategis. Aktivitas diplomasi Publik berperan sebagai pendukung dan penunjang bagi keberhasilan diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintahan.<sup>22</sup> Dengan adanya diplomasi yang baik diantara kedua negara maka diharapkan akan dapat ditemukan solusi atas isu imigrasi yang telah menjadi bola panas hubungan baik antara AS-Meksiko selama pemerintahan Trump.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Kebijakan imigrasi pada masa Presiden Trump dilaksanakan karena banyaknya imigran gelap yang masuk ke AS lewat perbatasan Meksiko. Presiden Trump merasa bahwa masuknya imigran gelap dari Meksiko ini membuat permasalahan kriminal meningkat dan dapat membuat AS menjadi negara yang tidak aman. Trump memberlakukan kebijakan ‘toleransi nol’ yang memisahkan

---

<sup>22</sup>Sukawarsini Djelantik. 2016, "Diplomasi dalam Politik Global, "Halaman xii

anak dan orang tuanya yang dokumen keimigrasiannya tidak lengkap. Kebijakan ini mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya adalah aktivis HAM yang mengatakan bahwa kebijakan imigrasi pada pemerintahan Trump dimaksudkan untuk menciptakan kekejaman terhadap jutaan keluarga imigran di seluruh AS.<sup>23</sup>

Kebijakan imigrasi Trump bertentangan dengan kerja sama internasional dalam membantu pengungsi. Kebijakan Trump dinilai diskriminatif, bahkan rasialis dan membahayakan keutuhan AS. Ratusan diplomat menyebarkan memo mengkritisi kebijakan Presiden Trump kepada pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS. Mereka menganggap kebijakan tersebut tidak efektif untuk melawan terorisme, merusak citra AS, dan pada akhirnya mengancam perekonomian AS.<sup>24</sup>

Kebijakan imigrasi Pemerintahan Trump merupakan bagian dari janji politik masa kampanye Presiden Trump "*American First*". Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai bangsa AS yang meyakini negaranya sebagai tanah kebebasan dan harapan. Hal ini juga dianggap sebagai pengingkaran sejarah AS yang dibangun oleh kaum migran dan menempatkan AS sebagai negara yang tidak lagi mendukung demokrasi dan HAM. Berdasarkan identifikasi masalah maka penelitian ini berfokus pada isu imigrasi di perbatasan Meksiko pada masa pemerintahan Presiden Trump.

---

<sup>23</sup>R24,2017, "Trump segera deportasi imigran ilegal," diakses pada 16 November 2019 melalui <https://www.pinterpolitik.com/trump-segera-deportasi-imigran-ilegal/>

<sup>24</sup> Adirini Pujayanti, 2017, "Kebijakan Imigrasi Pemerintahan Presiden Donald Trump," Majalah info singkat hubungan internasional Vol. IX, No. 03/I/Puslit/Februari/2017, diakses pada 16 November 2019 melalui [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-IX-1-I-P3DI-Februari-2017-179.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-1-I-P3DI-Februari-2017-179.pdf)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa isu imigrasi adalah sebuah isu yang penting untuk dibahas untuk mengetahui kebijakan yang akan diambil oleh suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Berdasarkan konsepsi kedaulatan maka setiap penguasa wilayah suatu negara, menetapkan ketentuan hukum yang mengatur dan mengawasi lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah negara tersebut. Dalam penelitian ini, akan dibahas tentang kebijakan imigrasi pada masa pemerintahan Trump dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Tanggal 21 Januari 2017 adalah masa setelah terpilihnya Presiden Trump sedangkan akhir periode 7 Juni 2019 diambil karena AS dan Meksiko menandatangani beberapa kerjasama untuk penyelesaian permasalahan di antara kedua negara. Sehingga hasil penelitian akan dapat menguraikan latar belakang tembok perbatasan Meksiko dibangun dan penerapan kebijakan “*zero tolerance*” yang mendapatkan banyak kecaman dari berbagai kalangan.

### **1.2.1 Pembatasan Waktu**

Dalam tulisan ini penulis akan menganalisa diplomasi AS terhadap Meksiko terkait kasus tembok isu imigrasi di perbatasan Meksiko. Periode waktu yang diambil adalah pada masa pemerintahan Donald Trump 21 Januari 2017- 7 Juni 2019. Batas pemilihan waktu penelitian adalah 21 Januari 2017 bertepatan dengan dilantiknya Donald trump sebagai Presiden ke 45 AS sampai 21 Juni 2019 saat Pemerintah AS dan Meksiko menyetujui beberapa program untuk mengatasi masuknya imigran gelap dan Presiden Trump telah mendapatkan persetujuan

dana untuk membangun tembok perbatasan di Meksiko.<sup>25</sup> Pemilihan waktu ini dikarenakan Trump dikenal dengan kebijakan imigrasinya yang mendatangkan polemik dan sikapnya yang keras pada pembangunan tembok perbatasan di Meksiko. Pada pidato inagurasinya setelah resmi menjabat, Trump mengatakan, *“Kita telah membela perbatasan negara lain sementara menolak untuk membela perbatasan kita sendiri;”*<sup>26</sup>

Pada era pemerintahan Trump, isu imigrasi masih menjadi permasalahan krusial di AS dan terus mengalami perkembangan, oleh sebab itu tahun 2017 sebagai awal Pemerintahan Trump akan dipilih menjadi awal batasan waktu penelitian dan diakhiri pada tahun 7 Juni 2019 dimana permasalahan perbatasan menjadi prioritas Trump. Pada tahun 2019 juga permasalahan tembok di perbatasan Meksiko diselesaikan. Selama rentang 2017 sampai 2019, terdapat beberapa penyelesaian dengan diplomasi terkait dengan isu imigrasi dan pembangunan tembok perbatasan Meksiko. Sehingga penulis akan menfokuskan pada masalah isu imigrasi dan pembangunan tembok perbatasan Meksiko pada kurun waktu 21 Januari 2017- 7 Juni 2019.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Dari pembatasan masalah diatas merumuskan penelitian sebagai berikut:  
**“Bagaimana diplomasi Amerika Serikat terhadap Meksiko dalam menangani isu imigrasi di perbatasan?”**

---

<sup>25</sup>Eben E.Siadari.Sabtu, 21 Januari 2017. Teks Lengkap Pidato Inagurasi Donald Trump., diakses pada 16 November 2019 melalui <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/teks-lengkap-pidato-inaugurasi-donald-trump>

<sup>26</sup> Ibid, Eben E.Siadari.Sabtu, 21 Januari 2017. Teks Lengkap Pidato Inagurasi Donald Trump.

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti diplomasi AS terhadap Meksiko mengenai isu imigrasi di perbatasan. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kerangka pikiran pembaca terkait hubungan kerjasama AS dan Meksiko, serta permasalahan yang terjadi di area perbatasan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang bagaimana sebuah negara akhirnya mengambil keputusan untuk melindungi atau memenuhi kepentingan negaranya.

### 1.4 Kajian Literatur

Penelitian ini menggunakan tiga literatur yang sebagai pembanding dan pembeda dengan penelitian lain yang telah dilaksanakan. Literatur pertama adalah artikel yang ditulis oleh Adwiyati Triputi berjudul, “Efektivitas *Twenty First Century Border Management* AS–Meksiko Dalam Penanggulangan Imigran Ilegal.”<sup>27</sup> Membahas keefektifan kebijakan AS dalam menangani penanggulangan masalah imigran ilegal di perbatasan. Penulis menganalisis implementasi *Twenty First Century Border Management* AS-Meksiko dalam Penanggulangan Imigran Ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *21 st Century Border Management* cukup efektif dalam penanggulangan arus imigran ilegal, ditandai dengan menurunnya jumlah imigran ilegal di AS dan jumlah percobaan masuk secara ilegal. *21 st Century Border* mendorong hubungan koordinasi antara AS dan Meksiko lebih aktif di perbatasan dan mendorong kedua Negara membuat

---

<sup>27</sup>Adwiyati Triputi, 2016, “Efektivitas *Twenty First Century Border Management* Amerika Serikat – Meksiko Dalam Penanggulangan Imigran Ilegal diakses pada tanggal 29 September 2019 melalui <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/19119>

penyesuaian program di masing-masing negara yang mendukung pencapaian tujuan keduanya.

Pada literatur pertama perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah pada permasalahan imigran ilegal di antara kedua negara dengan pemberlakuan *21 st Century Border Management* untuk penanggulangan arus imigran ilegal. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan membahas tentang isu imigrasi pada pemerintahan Presiden Trump yang membuat Trump bersikeras membangun tembok di perbatasan.

Selanjutnya literatur kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Leorenzo Lamaz berjudul, “Kerjasama AS-Meksiko dalam *Merida Initiative* untuk menanggulangi peredaran narkoba.”<sup>28</sup> Berisikan tentang bagaimana pola kerjasama *Merida Initiative* di AS Serikat dan Meksiko dapat menanggulangi peredaran narkoba dan menjelaskan sejauh mana implikasi dari *Merida Initiative* terhadap penanggulangan narkoba di kedua wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AS dan Meksiko setuju untuk menjalin kerjasama dalam pemberantasan narkoba di kedua negara. Kerjasama *Merida Initiative* dilakukan dengan cara AS memberikan bantuan dana kepada Meksiko. Bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan pengamanan perbatasan, mobilisasi personel, dan pelatihan teknis bagi kedua negara dalam mengatasi permasalahan narkoba.

Pada literatur kedua, pembeda yang nyata adalah pada pokok bahasan yaitu kerjasama dalam bidang pemberantasan narkoba di antara AS dan Meksiko. Sedangkan persamaannya adalah pada pembahasan hubungan perbatasan AS dan

---

<sup>28</sup>Leorenzo Lamaz, 2016, “Kerjasama Amerika Serikat-Meksiko dalam *Merida Initiative* untuk menanggulangi peredaran narkoba,” diakses pada tanggal 29 September 2019 melalui <http://repository.unpas.ac.id/12093/>

Meksiko. Literatur kedua tidak menitikberatkan pada isu imigrasi di perbatasan AS dan Meksiko, tetapi pada kerjasama pemberantasan akibat kejahatan narkoba. *Merida Initiative* merupakan penyempurnaan kerangka kerjasama dalam menangani permasalahan narkoba sebelumnya, yaitu *Bi-national Drug Control Strategy*. Kerjasama *Merida Initiative* ini disempurnakan dengan cara menggunakan kekuatan militer

Selanjutnya literatur ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Verdinand Robertua dengan judul, *Hillary Clinton Vs Donald Trump: Quo Vadis Intervensi Kemanusiaan?*<sup>29</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini membahas perbandingan kebijakan luar negeri Hillary Clinton dan Donald Trump terkait legitimasi intervensi kemanusiaan dalam kebijakan luar negeri AS. Kedua kandidat calon presiden memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda dan berlawanan.

Pada literatur ketiga, perbedaannya adalah penelitian berfokus pada pada kebijakan luar negeri masing-masing kandidat presiden AS. Sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada isu imigrasi pada pemerintahan Presiden Trump. Presiden Trump membawa kebijakan luar Negeri AS dengan membangun tembok raksasa di Meksiko, *travel ban* dan mengisolasi diri dari negara-negara yang rawan menyumbang imigran. Sedangkan persamaannya penelitian terdahulu dengan yang akan dilaksanakan adalah menganalisis kebijakan luar negeri AS Serikat.

---

<sup>29</sup>Verdinand Robertua, 2016, "Hillary Clinton Vs Donald Trump: Quo Vadis Intervensi Kemanusiaan?" JIPSI. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Volume VI No. 1 / Juni 2016

Literatur keempat adalah karya Jurnal Irma Febriyanti berjudul, *“Trump’s Border Wall: The Flurry Loss Of Immigrant’s Rigths And Reshaping Immigrant Law.”*<sup>30</sup> Berisikan tentang analisa kebijakan Trump terkait tembok perbatasan yang dibangun dan dampaknya terhadap isu hak asasi manusia. Hasil penelitian ini menyebutkan Presiden terpilih AS, Donald Trump, telah mendeklarasikan serangkaian kebijakan dalam dan luar negeri, salah satu kebijakan tersebut adalah *U.S.-Mexico border wall* (tembok perbatasan AS - Meksiko). Kebijakan ini adalah perintah eksekutif dan bersikeras agar Meksiko akan mengganti AS atas biaya tersebut. Tindakan ini menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dimana berbagai macam negara secara global telah serius menentang hal ini dan juga bahkan berusaha untuk memperebutkan hak asasi mereka atau warga negara lain yang membutuhkan dukungan.

Pada literatur keempat, perbedaannya adalah pada kebijakan *U.S.-Mexico border wall*. Penelitian ini hanya menfokuskan pada masalah *U.S.-Mexico border wall* dan pembentukan imigrasi baru pada pemerintahan Trump. Sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan, yang akan dikaji adalah diplomasi terkait isu imigrasi di perbatasan AS dan Meksiko dengan periode waktu pemerintahan Presiden Trump. Persamaan penelitian yang akan dilaksanakan dengan literatur adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang isu di perbatasan AS dan Meksiko.

Selanjutnya adalah literatur ke lima yaitu jurnal oleh Muhammad Arraf Rezkia Rachman dengan judul, *“Analisis Kebijakan Travel Ban oleh Donald*

---

<sup>30</sup>Irma Febriyanti, 2017, *“Trump’s Border Wall: The Flurry Loss Of Immigrant’s Rigths And Reshaping Immigrant Law.*Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 3, Nomor 1. 2107

*Trump*.<sup>31</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kebijakan luar negeri pada era pemerintahan Donald Trump khususnya kebijakan *travel ban* untuk tujuh negara muslim di dunia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah pada era pemerintarah Trump. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu, fokus pada *travel ban* sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan fokus pada isu imigrasi sampai dibangunnya tembok perbatasan di Meksiko.

### 1.5 Kerangka Pemikiran

Kebijakan luar negeri dapat dipandang sebagai sintesis dari kepentingan nasional yang mengandalkan *power* dan kapabilitas suatu negara. Kebijakan luar negeri dinilai lebih penting daripada kebijakan-kebijakan lain karena mengandung kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri sebagai sebuah tindakan-tindakan pemerintah yang bertujuan untuk memperjuangkan *national interest*.<sup>32</sup> Berdasarkan tulisan dari Reynolds *national interest* yang dijalankan oleh aktor lain selain negara juga dianggap sebuah kemajuan kelompok/lembaga/individu tersebut dalam menjalankan peran terhadap aktor internasional lain juga salah satu sebagai usaha dalam memajukan *national interest* dimana kelompok/lembaga/individu itu berada.

Menurut Mark Politik luar negeri adalah tindakan eksplisit dan implisit dari pejabat pemerintah yang dirancang untuk mempromosikan kepentingan nasional di luar batas teritorial suatu negara. Pada defenisi ini, terdapat tiga tekanan utama

---

<sup>31</sup>Muhammad Arraf Rezkia Rachman, 2018, "Analisis Kebijakan Travel Ban oleh Donald Trump. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.04, No.02, Bulan 2018

<sup>32</sup>P. A. Reynolds, *An Introduction to International Politics* (Longman, 1971), hlm. 35

yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melawati batas kewilayahan negara.<sup>33</sup>

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri memerlukan diplomasi yang memegang peran penting dalam keberlangsungan hubungan dua negara. Kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. *Policy* itu sendiri berakar pada konsep "pilihan (*choices*)" memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep "wilayah" membantu upaya memahami konsep luar negeri (*foreign*). Kedaulatan berarti kontrol atas wilayah (dalam) yang dimiliki oleh suatu Negara. Jadi, kebijakan luar negeri (*foreign policy*) berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu Negara.

Diplomasi didefinisikan sebagai sebuah seni bernegosiasi dengan negara yang lain. Dalam perkembangan diplomasi saat ini, beberapa ahli mengatakan bahwa diplomasi telah meninggalkan sisi tradisionalnya yaitu dominasi negara. Telah terjadi perubahan sifat diplomasi yang mana diplomasi mengarah pada manajemen hubungan antara negara dan aktor hubungan internasional yang lain.<sup>34</sup>

Diplomasi merujuk pada aktivitas politik yang dilakukan oleh para aktor untuk mengejar tujuannya dan mempertahankan kepentingannya melalui

---

<sup>33</sup>Amstutz, Mark. 2013. *International Ethics: Concepts, Theories, and Cases in Global Politics*. Boulder: Rowman & Littlefield

<sup>34</sup>Tonny Dian Effendi, 2018, "Diplomasi Publik Sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia," Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. Halaman 49

negosiasi, tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, atau hukum. Diplomasi terdiri dari komunikasi antar sejumlah pihak yang didesain untuk mencapai kesepakatan. Diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Sir Earnest Satow yang mengartikan diplomasi sebagai penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antar pemerintah negara-negara berdaulat.<sup>35</sup>

Selain berkaitan erat dengan politik luar negeri, diplomasi juga dapat dikaitkan dengan kepentingan nasional.<sup>36</sup> Kepentingan nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk melangsungkan kehidupannya dengan cara melindungi identitas fisik, politik, kultural dari gangguan negara lain menurut Hans J. Morgenthau.<sup>37</sup> Kepentingan Nasional mengandung tujuan-tujuan utama suatu negara yang diinginkan dan harus dicapai.

Kepentingan nasional juga dirumuskan sebagai aspirasi dari suatu negara yang diwujudkan secara operasional dalam upaya mencapai suatu tujuan yang spesifik. Salah satu caranya adalah dengan operasionalisasi kepentingan nasional yang dapat dilakukan negara melalui sarana diplomasi yang mengandung arti

---

<sup>35</sup>Rizki Rahmadini Nurika, 2017, "Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer," *Jurnal Sospol*, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2017), Hlm 126-141

<sup>36</sup>Damar Kusuma wardhani, 2018, "Diplomasi sebuah instrumen untuk mencapai kepentingan nasional, diakses online pada 18 November 2019 melalui [http://damar-kusumawardani-fisip15.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-171119-Negosiasi%20dan%20Diplomasi-Diplomasi:%20Sebuah%20Instrumen%20untuk%20Mencapai%20Kepentingan%20Nasional.html](http://damar-kusumawardani-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-171119-Negosiasi%20dan%20Diplomasi-Diplomasi:%20Sebuah%20Instrumen%20untuk%20Mencapai%20Kepentingan%20Nasional.html)

<sup>37</sup> Mas' oed, Mochtar, 1990, "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi," Jakarta : LP3ES, 1990, hal 190.

memperjuangkan kepentingan negara. Kepentingan nasional ini dapat berupa kepentingan ekonomi maupun politik.<sup>38</sup>

Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Kepentingan nasional sangat berperan dalam menentukan perilaku negara, karena menjadi pembenaran dari setiap kebijakan yang dipilih. Menurut Dadelford dan Lincoln (1962) kepentingan nasional meliputi kepentingan keamanan nasional, pengembangan ekonomi, peningkatan kekuatan nasional, kepentingan *prestise* nasional.<sup>39</sup>

Salah satu hal yang berhubungan dengan kepentingan nasional ini adalah isu imigrasi dan perbatasan negara. Berdasarkan konsepsi kedaulatan maka setiap penguasa wilayah suatu negara, menetapkan ketentuan hukum yang mengatur dan mengawasi lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah negara tersebut. Shaw menyatakan bahwa konsep yurisdiksi selalu terkait dengan Prinsip Kedaulatan Negara, Prinsip Persamaan dan Prinsip NonInterference. Yurisdiksi Nasional adalah suatu pernyataan untuk menentukan area dimana betapa tingginya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah, bebas dari campur tangan/pengaruh dan prinsip-prinsip hukum internasional.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Soeprapto, R, 1997, " Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi dan Perilaku," Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hal 144.

<sup>39</sup>Muhammad Syahril. 2018. Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Mencegah Penyelundupan Sabu Lintas Negara di Pos Lintas Batas Negara di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 3, 2018, hal. 489-498 diakses pada 12 November 2019 melalui <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>

<sup>40</sup>Eva Johan. 2013, "Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Dan Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara," diakses pada 12 November 2019 melalui *Yuridika: Volume 28 No 1, Januari-April 2013. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*

Dalam perspektif keimigrasian, Imigrasi Ilegal (*Illegal Immigration*) adalah berpindahnya seseorang yang melewati batas wilayah suatu negara dengan melanggar hukum. Di Indonesia, proses tersebut menjadi tidak sah atau tidak menurut hukum apabila melanggar ketentuan-ketentuan terkait dengan proses masuk/keluar wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang keimigrasian.<sup>41</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan metode untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran *holistic* lengkap dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun lewat sebuah latar ilmiah.<sup>42</sup> Berbeda dengan metode kuantitatif yang menyediakan deskripsi numerik dalam suatu topik.

Karena menggunakan metode kuantitatif maka sumber data yang dikumpulkan berbentuk artikel, jurnal, berita, buku, internet, dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa telaah pustaka (*library research*) dan studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan literatur berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas berupa *press release*, buku, dokumen, jurnal, artikel dari internet maupun media cetak.

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisa kemudian disimpulkan sedangkan data kuantitatif digunakan sebagai

---

<sup>41</sup>International Organization for Migrations, Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Pencegatan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia) (IOM, 2012) 2–3.

<sup>42</sup>Dr Ulber Silalahi .MA., *Metode Penelitian Sosial* ( Bandung, Refika Aditama, 2009), hal 77.

data pelengkap untuk menjelaskan data kualitatif. Peneliti mendeskripsikan hasil temuan penelitian untuk membahas tentang isu imigrasi AS dan Meksiko.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

### **Bab I: Pendahuluan.**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II: Hubungan AS dan Meksiko Terhadap Isu Imigrasi**

Bab ini membahas tentang latar belakang hubungan AS dan Meksiko dan Kebijakan imigrasi Presiden AS setelah Perang Dingin

### **Bab III: Diplomasi AS Dalam Mengatasi Isu Imigrasi Di Perbatasan Meksiko**

#### **Era Pemerintahan Trump**

Bab ini membahas hasil penelitian yaitu membahas tentang negosiasi antara AS dan Meksiko sampai dibangun tembok perbatasan AS-Meksiko, *Program/exchange* antara AS-Meksiko, Kebijakan Visa dan Membangun Tembok Perbatasan selama era pemerintahan Presiden Trump.

### **BAB IV : Kesimpulan**